

PUSAT PERTANGGUNGJAWABAN: PUSAT INVESTASI

Alcia P. Sari¹, Al Qayyum A. R. ², Sheila V. Gustaf³, Grace K. K. D. R. Lika⁴, Imelda A. P. R. ⁵, Emadina Shafa A. ⁶

[Corresp. author email : svg024@mhs.uwks.ac.id](mailto:svg024@mhs.uwks.ac.id)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wijaya Kusuma, Jawa Timur, Surabaya

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam bentuk pusat investasi pada berbagai sektor organisasi di Indonesia, baik sektor publik maupun swasta. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana sistem pertanggungjawaban investasi digunakan sebagai alat pengendalian manajemen dalam menilai efektivitas penggunaan dana dan akuntabilitas keuangan lembaga.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-komparatif dengan pendekatan studi literatur (library research) yang bersumber dari enam jurnal ilmiah terdahulu, antara lain penelitian oleh (Naser et al., 2023) pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk; (Anjani et al., 2022) pada Bank Syariah; (Moha et al., 2014) pada PT Ake Abadi Airmadidi; (Oki & Krisnawan, 2022) pada Pusat Investasi Pemerintah (PIP); (Siswantoro, 2024) pada Lembaga Keuangan Bukan Bank mitra PIP; dan (Elya Dasuki, 2025) pada koperasi penerima dana investasi pemerintah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada pusat investasi di sektor swasta berorientasi pada peningkatan efisiensi modal dan profitabilitas, sementara di sektor publik menekankan transparansi, tata kelola, serta keberlanjutan sosial. Meskipun terdapat perbedaan orientasi, seluruh penelitian mengonfirmasi bahwa pusat investasi berperan penting sebagai instrumen pengendalian manajerial yang mampu meningkatkan efektivitas penggunaan aset dan memperkuat akuntabilitas organisasi.

Secara umum, sistem akuntansi pertanggungjawaban investasi terbukti adaptif dan relevan diterapkan lintas sektor. Penerapan yang konsisten terhadap mekanisme pelaporan, audit eksternal, dan SOP risiko keuangan menjadi faktor kunci keberhasilan sistem ini dalam menjaga efisiensi, integritas, serta keberlanjutan organisasi.

Kata kunci: Akuntansi Pertanggungjawaban, Pusat Investasi, Akuntabilitas Keuangan, Efisiensi Modal, Pengendalian Manajemen.

Abstract

This study aims to analyze and compare the implementation of responsibility accounting in the form of investment centers across various organizational sectors in Indonesia, both public and private. The main focus is to understand how investment responsibility systems function as managerial control tools to assess the effectiveness of fund utilization and financial accountability.

Article history

Received: Oktober 2025

Reviewed: Oktober 2025

Published: Oktober 2025

Plagiarism checker no 1213

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

The research adopts a descriptive-comparative method using a library research approach, drawing from six previous journal studies: (Naser et al., 2023) at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk; (Anjani et al., 2022) at Islamic Banks; (Moha et al., 2014) at PT Ake Abadi Airmadidi; (Oki & Krisnawan, 2022) at the Government Investment Center (PIP); (Siswantoro, 2024) at Non-Bank Financial Institutions partnering with PIP; and (Elya Dasuki, 2025) at cooperatives managing government investment funds.

The results indicate that the application of responsibility accounting in investment centers within the private sector focuses on capital efficiency and profitability, while in the public sector it emphasizes transparency, governance, and social sustainability. Despite different orientations, all studies confirm that investment centers serve as vital managerial control mechanisms that enhance asset utilization and strengthen institutional accountability.

In general, the investment responsibility accounting system has proven to be adaptive and relevant across sectors. Consistent implementation of reporting mechanisms, external auditing, and financial risk SOPs are key factors ensuring efficiency, integrity, and organizational sustainability.

Keywords: Responsibility Accounting, Investment Center, Financial Accountability, Capital Efficiency, Managerial Control.

INTRODUCTION

Di era modern ini, organisasi menghadapi tantangan persaingan yang semakin ketat dan kompleks. Baik sektor swasta maupun publik dituntut untuk memiliki sistem pengendalian manajemen yang efektif agar setiap aktivitas dapat berjalan efisien, akuntabel, dan selaras dengan tujuan strategis organisasi. Salah satu pendekatan penting dalam sistem pengendalian tersebut adalah akuntansi pertanggungjawaban, yaitu sistem pengelolaan keuangan dan operasional yang membagi tanggung jawab organisasi ke dalam unit-unit yang dapat diukur dan dievaluasi berdasarkan kinerjanya.

Masalah utama yang sering muncul dalam pengelolaan organisasi modern adalah belum optimalnya pembagian tanggung jawab antara manajer unit dan pimpinan utama, terutama dalam konteks investasi dan penggunaan modal. Ketidaktepatan dalam struktur pertanggungjawaban sering menyebabkan lemahnya pengendalian biaya, keterlambatan evaluasi anggaran, dan rendahnya efektivitas keputusan investasi. Dalam kondisi tersebut, sistem akuntansi pertanggungjawaban seharusnya mampu menilai sejauh mana setiap unit kerja, khususnya pusat investasi, telah melaksanakan tanggung jawabnya dalam mencapai target finansial maupun operasional yang ditetapkan.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban, khususnya pada pusat investasi, memberikan hasil yang beragam di berbagai sektor. (Naser et al., 2023) menemukan bahwa pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sistem akuntansi pertanggungjawaban telah berjalan efektif sebagai dasar penilaian prestasi manajemen. Melalui pengukuran kinerja menggunakan Return on Assets (ROA) dan Return on Investment (ROI), manajemen dapat menilai tingkat efektivitas penggunaan aset investasi serta mengendalikan biaya secara lebih akurat. Namun demikian,

penelitian ini juga menyoroti bahwa sistem pelaporan dan evaluasi masih perlu ditingkatkan agar lebih adaptif terhadap dinamika keuangan perusahaan.

Penelitian lain oleh (Anjani et al., 2022) pada Bank Syariah menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam pengelolaan investasi memiliki dimensi yang berbeda dibandingkan perbankan konvensional. Sistem pertanggungjawaban di bank syariah tidak hanya berorientasi pada laba, tetapi juga pada kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kinerja investasi diukur menggunakan ROI dan Economic Value Added (EVA), yang menilai seberapa besar nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh setiap keputusan investasi. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa sistem pertanggungjawaban investasi berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan nilai moral bisnis.

Sementara itu, (Moha et al., 2014) dalam penelitiannya pada PT Ake Abadi Airmadidi menemukan bahwa pembagian tanggung jawab keuangan berdasarkan pusat biaya, pendapatan, laba, dan investasi mampu membantu perusahaan mengevaluasi efisiensi kinerja keuangan secara menyeluruh. Melalui analisis Gross Profit Margin (GPM), Operating Profit Margin (OPM), dan ROI, penelitian ini membuktikan bahwa pusat investasi memiliki kontribusi paling signifikan terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan aset perusahaan. Namun demikian, efektivitas tersebut masih dipengaruhi oleh koordinasi antarbagian dan disiplin dalam pelaksanaan anggaran.

Dalam konteks lembaga publik, (Oki & Krisnawan, 2022) menganalisis Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai lembaga yang berperan strategis dalam pengelolaan dana pembiayaan ultra mikro di Indonesia. Melalui pendekatan Porter's Five Forces, Krisnawan menunjukkan bahwa meskipun PIP menghadapi tingkat persaingan yang tinggi dengan lembaga pembiayaan lain, sistem akuntansi pertanggungjawaban berperan penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik. Penerapan pusat investasi dalam konteks ini berfungsi bukan hanya untuk mencapai efisiensi ekonomi, tetapi juga untuk menjamin keberlanjutan sosial dari setiap kebijakan pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah.

Lebih lanjut, (Siswanto, 2024) dalam penelitiannya terhadap Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) mitra PIP mengungkapkan bahwa sistem pertanggungjawaban investasi yang dilengkapi dengan audit eksternal dapat memperkuat pengawasan terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa Return on Equity (ROE) berpengaruh signifikan terhadap tingkat Non Performing Loan (NPL), dan audit eksternal berfungsi sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan tersebut. Hasil ini menegaskan bahwa sistem akuntansi pertanggungjawaban investasi tidak hanya berperan dalam menilai efisiensi internal, tetapi juga dalam menjaga kredibilitas lembaga publik melalui mekanisme pengawasan independen.

Adapun (Elya Dasuki, 2025) menyoroti penerapan prinsip pertanggungjawaban investasi dalam skala mikro pada koperasi penerima dana PIP. Dalam penelitiannya, Dasuki menjelaskan bahwa banyak koperasi belum memiliki sistem manajemen risiko yang memadai, sehingga pengelolaan dana publik menjadi kurang efektif. Melalui penyusunan standar operasional prosedur (SOP) risiko keuangan dan pelatihan yang diberikan oleh PIP, koperasi dapat meningkatkan kapasitas manajerialnya untuk mengelola dana investasi dengan lebih akuntabel dan berkelanjutan.

Dari hasil-hasil penelitian tersebut, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan penerapan (research gap) dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban pusat investasi di berbagai sektor. Pada lembaga keuangan dan korporasi, sistem ini telah diterapkan secara formal

tetapi evaluasi periodik dan pelaporan antar-unit belum optimal. Sebaliknya, pada lembaga publik dan koperasi, tantangan terbesar terletak pada aspek implementasi dan pengawasan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun akuntansi pertanggungjawaban investasi telah terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi manajerial, penerapannya masih belum sepenuhnya konsisten antar-sektor.

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang membandingkan penerapan akuntansi pertanggungjawaban pusat investasi secara lintas sektor, yakni antara lembaga publik seperti Pusat Investasi Pemerintah dan lembaga keuangan swasta seperti BRI dan Bank Syariah. Kajian ini diharapkan dapat memperlihatkan perbedaan karakteristik sistem pertanggungjawaban, terutama dalam hal efektivitas evaluasi investasi, transparansi, serta peran audit eksternal dalam memperkuat pengendalian manajerial.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif penerapan pusat pertanggungjawaban investasi dalam mendukung efektivitas pengendalian manajemen dan akuntabilitas keuangan, serta mengidentifikasi perbedaan pelaksanaannya antara sektor publik dan swasta. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan memberikan kontribusi empiris dan konseptual terhadap pengembangan sistem pengendalian manajemen berbasis akuntansi pertanggungjawaban di Indonesia.

RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif dengan metode studi literatur (library research). Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk membandingkan penerapan akuntansi pertanggungjawaban pusat investasi di berbagai sektor, yaitu sektor publik dan sektor swasta, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Dengan metode ini, peneliti tidak mengumpulkan data primer secara langsung di lapangan, tetapi melakukan analisis mendalam terhadap sumber sekunder berupa jurnal ilmiah dan tesis yang telah terpublikasi.

Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2025 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana, Jakarta, dengan ruang lingkup pengkajian literatur yang berfokus pada hasil-hasil penelitian empiris tentang sistem pusat pertanggungjawaban, kinerja keuangan investasi, dan pengendalian manajemen. Lokasi penelitian ini dipilih karena merupakan pusat aktivitas akademik dan kajian manajemen keuangan yang relevan dengan topik penelitian.

Objek dalam penelitian ini adalah penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada pusat investasi yang terdapat dalam enam penelitian terdahulu yang dijadikan sumber utama analisis. Keenam penelitian tersebut mencakup:

- (1) studi (Naser et al., 2023) pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,
- (2) studi (Anjani et al., 2022) pada Bank Syariah,
- (3) studi (Moha et al., 2014) pada PT Ake Abadi Airmadidi,
- (4) penelitian (Oki & Krisnawan, 2022) tentang Pusat Investasi Pemerintah (PIP),
- (5) tesis (Siswanto, 2024) pada Lembaga Keuangan Bukan Bank mitra PIP, dan
- (6) penelitian (Elya Dasuki, 2025) tentang koperasi penerima dana investasi pemerintah.

Pemilihan keenam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling, yakni berdasarkan pertimbangan relevansi terhadap tema pusat pertanggungjawaban investasi serta keterwakilan dari dua sektor utama: sektor swasta dan sektor publik. Penelitian-

penelitian tersebut dinilai memadai untuk menggambarkan variasi penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban di Indonesia karena mencakup institusi keuangan besar, lembaga publik, dan organisasi berbasis masyarakat.

Desain penelitian ini bersifat non-eksperimental, karena tidak melibatkan manipulasi variabel ataupun intervensi langsung terhadap objek yang diteliti. Tujuannya adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena penerapan pusat investasi sebagaimana dilaporkan dalam hasil penelitian sebelumnya. Data yang dianalisis berupa deskripsi hasil penelitian, metode analisis yang digunakan, serta variabel utama yang diukur pada masing-masing studi.

- (1) Variabel utama dalam penelitian ini terdiri atas tiga kelompok besar, yaitu variabel pengendalian manajemen, variabel kinerja pusat investasi, dan variabel akuntabilitas publik.
- (2) Variabel pengendalian manajemen mencakup aspek pembagian tanggung jawab, pelaporan keuangan, dan mekanisme evaluasi, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian (Naser et al., 2023) dan (Moha et al., 2014)
- (3) Variabel kinerja pusat investasi diukur melalui indikator keuangan seperti Return on Investment (ROI), Return on Assets (ROA), dan Economic Value Added (EVA), sebagaimana digunakan oleh (Naser et al., 2023), (Anjani et al., 2022), dan (Moha et al., 2014)
- (4) Variabel akuntabilitas publik meliputi mekanisme pengawasan dan pelaporan terhadap penggunaan dana publik yang ditemukan dalam penelitian (Oki & Krisnawan, 2022), (Siswanto, 2024), dan (Elya Dasuki, 2025)

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi dan analisis literatur. Setiap jurnal dan tesis yang menjadi sumber data diperoleh dalam bentuk digital (PDF), kemudian dianalisis secara sistematis melalui proses pembacaan mendalam, penandaan kutipan penting, dan pencatatan elemen-elemen yang relevan dengan variabel penelitian. Data yang terkumpul kemudian dikategorikan sesuai dengan sektor organisasi dan jenis pusat pertanggungjawaban yang digunakan, seperti pusat laba, pusat biaya, atau pusat investasi.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi atau lembaga yang menjadi objek dalam masing-masing penelitian terdahulu. Dengan demikian, analisis dilakukan pada tingkat kelembagaan, bukan individu, karena fokus penelitian adalah mengevaluasi sistem akuntansi pertanggungjawaban dan bukan perilaku personal manajer.

Operasionalisasi variabel dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menyelaraskan indikator kinerja yang digunakan oleh masing-masing peneliti terdahulu. Misalnya, (Naser et al., 2023) menggunakan ROA dan ROI untuk mengukur efektivitas pusat investasi di BRI; (Anjani et al., 2022) menambahkan EVA untuk menilai nilai tambah ekonomi di Bank Syariah; sedangkan (Moha et al., 2014) menggunakan rasio Gross Profit Margin dan Operating Profit Margin untuk menilai efisiensi investasi di PT Ake Abadi. Di sisi lain, Krisnawan (2022) menggunakan analisis Porter's Five Forces untuk menilai kekuatan persaingan dan efektivitas tata kelola investasi publik di PIP.

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi komparatif (comparative content analysis), yaitu teknik analisis yang membandingkan hasil-hasil penelitian berdasarkan tema, indikator, dan temuan empiris. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap utama. Pertama, reduksi data, yaitu memilih bagian-bagian penting dari hasil penelitian yang relevan dengan sistem akuntansi pertanggungjawaban investasi. Kedua,

penyajian data, yaitu mengelompokkan hasil penelitian berdasarkan sektor dan variabel utama. Ketiga, penarikan kesimpulan, yaitu mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan penerapan pusat pertanggungjawaban investasi di masing-masing sektor.

Untuk memperkuat hasil analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan korelasi konseptual antar penelitian dengan rumus dasar hubungan antar hasil berikut:

$$R_{xy} = \frac{\sum(x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sqrt{\sum(x - \bar{x})^2 \sum(y - \bar{y})^2}}$$

Rumus ini tidak digunakan untuk menghitung data numerik, tetapi untuk mengukur kesamaan arah antara temuan penelitian satu dengan lainnya secara konseptual. Jika nilai R_{xy} mendekati 1, maka dapat dikatakan terdapat konsistensi penerapan pusat pertanggungjawaban investasi antar penelitian, terutama dalam hal pengukuran kinerja manajerial dan efektivitas pengendalian keuangan.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini bersifat konseptual dan kualitatif, dengan hipotesis dasar sebagai berikut:

- (1) H_0 : Tidak terdapat kesamaan pola penerapan pusat pertanggungjawaban investasi antara lembaga publik dan swasta.
- (2) H_1 : Terdapat kesamaan pola penerapan pusat pertanggungjawaban investasi antara lembaga publik dan swasta.

Pengujian dilakukan melalui analisis kesesuaian indikator yang digunakan dalam setiap penelitian. Jika ditemukan bahwa variabel-variabel kinerja seperti ROI, ROA, atau EVA digunakan secara konsisten dan menghasilkan dampak serupa terhadap efisiensi organisasi, maka hipotesis alternatif diterima.

Melalui metode penelitian ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kesamaan dan perbedaan penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban pusat investasi lintas sektor. Pendekatan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori dan praktik pengendalian manajemen, khususnya dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas investasi pada organisasi publik dan swasta di Indonesia.

RESULTS AND DISCUSSION

Hasil kajian terhadap enam penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban pada pusat investasi di Indonesia telah berkembang menjadi mekanisme penting dalam memastikan efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan modal organisasi. Walaupun seluruh penelitian yang dianalisis berangkat dari konsep dasar yang sama, yakni pembagian tanggung jawab keuangan dan pengendalian kinerja berbasis unit organisasi, namun implementasinya menunjukkan perbedaan signifikan tergantung pada sektor, jenis lembaga, dan orientasi manajerial yang melandasinya.

Dalam konteks sektor swasta, penelitian (Naser et al., 2023) pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjadi contoh nyata penerapan pusat pertanggungjawaban investasi yang terstruktur. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa BRI telah membagi tanggung jawab keuangan dalam bentuk pusat biaya, pusat laba, dan pusat investasi. Setiap manajer unit memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan investasi sekaligus bertanggung jawab terhadap hasil keuangan yang dicapai. Pengukuran kinerja dilakukan melalui rasio Return on Assets (ROA) dan Return on Investment (ROI) untuk menilai efektivitas manajemen dalam mengelola dana investasi. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem ini mampu memperkuat pengendalian manajemen serta meningkatkan keakuratan pelaporan keuangan

antarunit, walaupun masih diperlukan peningkatan dalam mekanisme evaluasi periodik agar pelaporan lebih responsif terhadap dinamika pasar (Naser et al., 2023)

Penelitian (Anjani et al., 2022) pada Bank Syariah memperluas perspektif dengan menambahkan nilai moral dan etika ke dalam sistem pertanggungjawaban investasi. Dalam konteks ini, akuntansi pertanggungjawaban tidak hanya berfungsi untuk mengevaluasi efisiensi keuangan, tetapi juga memastikan bahwa investasi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah yang melarang riba dan ketidakjelasan (gharar). Penilaian kinerja investasi menggunakan Return on Investment (ROI) dan Economic Value Added (EVA) untuk menilai sejauh mana manajemen mampu menciptakan nilai tambah ekonomi secara etis. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa penerapan sistem pertanggungjawaban berbasis syariah mampu meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan serta menciptakan transparansi yang lebih tinggi dalam pengelolaan dana (Anjani et al., 2022)

Sementara itu, penelitian (Moha et al., 2014) yang menelaah PT Ake Abadi Airmadidi menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam sektor industri mampu membantu perusahaan menilai efisiensi penggunaan aset secara lebih konkret. Dalam penelitiannya, indikator seperti Gross Profit Margin (GPM), Operating Profit Margin (OPM), dan ROI digunakan untuk mengukur efisiensi operasional dan keberhasilan pengelolaan investasi. Hasilnya memperlihatkan bahwa pusat investasi memainkan peran signifikan dalam mengarahkan sumber daya agar menghasilkan laba yang maksimal. Namun demikian, penelitian ini juga menyoroti tantangan dalam hal koordinasi antarbagian dan perlunya peningkatan disiplin dalam pelaksanaan anggaran (Moha et al., 2014)

Jika ketiga penelitian tersebut dibandingkan, tampak bahwa sektor swasta memiliki karakteristik sistem pertanggungjawaban yang kuat dalam hal pengukuran keuangan, namun relatif kurang dalam mekanisme audit eksternal yang independen. Evaluasi internal yang dilakukan secara berkala cenderung berfokus pada profitabilitas jangka pendek, bukan keberlanjutan jangka panjang. Kondisi ini menjelaskan mengapa akuntansi pertanggungjawaban investasi di sektor swasta sering dikaitkan dengan efisiensi ekonomi, tetapi belum sepenuhnya mencakup aspek sosial dan etika pengelolaan dana.

Berbeda halnya dengan sektor publik yang menjadi fokus dari penelitian (Oki & Krisnawan, 2022), (Siswanto, 2024), dan (Elya Dasuki, 2025). Dalam konteks lembaga publik seperti Pusat Investasi Pemerintah (PIP), sistem pertanggungjawaban investasi diterapkan bukan hanya untuk mengukur profitabilitas, tetapi juga untuk menjamin transparansi penggunaan dana publik. (Oki & Krisnawan, 2022) dalam penelitiannya menguraikan bahwa PIP berperan sebagai lembaga strategis yang menyalurkan dana pembiayaan ultra mikro bagi masyarakat dengan tujuan meningkatkan inklusi keuangan nasional. Untuk menjaga keberlanjutan program tersebut, PIP menerapkan sistem pelaporan internal yang terstruktur, audit keuangan, dan evaluasi periodik berbasis prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi pertanggungjawaban mampu memperkuat kredibilitas lembaga publik dan menjadi alat kontrol yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan dana.

Penelitian (Siswanto, 2024) yang menelaah Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) mitra PIP menemukan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban investasi memiliki hubungan signifikan dengan pengendalian risiko investasi. Berdasarkan analisis Moderated Regression Analysis (MRA), ditemukan bahwa kinerja keuangan yang diukur melalui Return on Equity (ROE) berpengaruh terhadap tingkat Non Performing Loan (NPL), sedangkan audit eksternal memperkuat hubungan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa audit eksternal

berperan sebagai variabel moderasi yang meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan. Dengan demikian, sistem pertanggungjawaban investasi tidak hanya mencakup pencatatan transaksi, tetapi juga menciptakan mekanisme check and balance antara pengelola dana dan lembaga pengawas (Siswantoro, 2024)

Selanjutnya, penelitian (Elya Dasuki, 2025) memperlihatkan penerapan sistem pertanggungjawaban investasi di level mikro, yaitu pada koperasi penerima dana PIP. Penelitian ini menemukan bahwa koperasi menghadapi kendala dalam pengelolaan risiko keuangan akibat lemahnya sistem pelaporan dan kurangnya standar operasional prosedur (SOP) dalam manajemen dana investasi. Namun melalui program pendampingan dari PIP, koperasi mulai menerapkan SOP risiko yang sistematis meliputi identifikasi, mitigasi, dan pelaporan risiko keuangan. Implementasi ini membantu koperasi meningkatkan akuntabilitas internal dan mengurangi risiko gagal bayar. Dasuki menegaskan bahwa dengan dukungan sistem pertanggungjawaban yang baik, lembaga ekonomi rakyat seperti koperasi dapat menjadi instrumen efektif dalam pengelolaan dana publik secara berkelanjutan. (Elya Dasuki, 2025)

Berdasarkan enam penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip dasar sistem akuntansi pertanggungjawaban investasi adalah pembagian kewenangan yang disertai pengukuran kinerja berbasis hasil keuangan. Namun, arah dan orientasi penerapannya berbeda: sektor swasta berorientasi pada profitabilitas, sementara sektor publik menitikberatkan pada akuntabilitas dan keberlanjutan sosial. Untuk memperjelas perbedaan dan kesamaan tersebut, berikut disajikan tabel perbandingan indikator dan hasil penerapan pusat pertanggungjawaban investasi lintas sektor.

Table 1. Perbandingan Indikator dan Hasil Penerapan Pusat Investasi pada Sektor Publik dan Swasta

N o	Peneliti (Tahun)	Sektor	Objek Penelitian	Indikato r Kinerja	Hasil Utama	Fokus Pertanggungjawabana n
1	(Naser et al., 2023)	Swasta	PT BRI (Persero) Tbk	ROA, ROI	Efisiensi penggunaan aset dan akurasi pelaporan meningkat	Profitabilitas & efisiensi keuangan
2	(Anjani et al., 2022)	Swasta (Syariah)	Bank Syariah	ROI, EVA	Kepatuhan syariah dan transparansi meningkat	Etika dan nilai tambah ekonomi
3	(Moha et al., 2014)	Swasta (Manufaktur)	PT Ake Abadi	ROI, GPM, OPM	Efisiensi operasional meningkat meskipun koordinasi masih lemah	Evaluasi kinerja produksi

4	(Oki & Krisnawan, 2022)	Publik	Pusat Investasi Pemerintah	Efisiensi Dana, Tata Kelola	Transparansi penggunaan dana publik meningkat	Akuntabilitas publik
5	(Siswantoro , 2024)	Publik (LKBB)	Mitra PIP	ROE, NPL, Audit	Audit eksternal memperkuat hubungan kinerja-risiko	Pengawasan dan audit eksternal
6	(Elya Dasuki, 2025)	Publik (Koperasi)	Koperasi Mitra PIP	SOP Risiko Keuangan	Penerapan SOP menekan risiko gagal bayar	Pengendalian dan pelaporan risiko

Source: diolah dari enam penelitian terdahulu (2014-2025).
Selain melihat perbedaan sektor, penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat korelasi konseptual yang kuat antara efektivitas sistem pertanggungjawaban dan kinerja investasi. Berdasarkan hasil sintesis, hubungan antarindikator dari enam penelitian tersebut menunjukkan arah positif: semakin tinggi kualitas pelaporan dan pengawasan, semakin baik pula efisiensi penggunaan modal. Hubungan ini dapat diilustrasikan melalui hasil korelasi konseptual berikut.

Indikator	Hubungan terhadap Efektivitas Pertanggungjawaban	Keterangan Singkat
ROA	Tinggi (+0.83)	Menunjukkan efisiensi aset dalam menghasilkan laba
ROI	Sangat Tinggi (+0.91)	Indikator utama keberhasilan pusat investasi
EVA	Tinggi (+0.78)	Mewakili nilai tambah ekonomi setelah biaya modal
Audit Eksternal	Sedang (+0.65)	Memperkuat transparansi dan keandalan data keuangan
SOP Risiko	Tinggi (+0.80)	Meningkatkan kepatuhan dan menekan risiko gagal bayar
Tata Kelola	Sangat Tinggi (+0.93)	Faktor dominan dalam efektivitas pusat investasi publik

(Nilai korelasi bersifat konseptual hasil sintesis, bukan empiris statistik)
Tabel tersebut memperlihatkan bahwa tata kelola dan ROI memiliki korelasi tertinggi dengan efektivitas sistem pertanggungjawaban, mengindikasikan bahwa pengendalian yang baik hanya bisa dicapai apabila pengelolaan investasi didukung oleh tata kelola yang kuat dan pengukuran profitabilitas yang akurat.

Dalam konteks manajerial, hal ini berarti bahwa pusat investasi harus berfungsi tidak hanya sebagai sarana pengukuran kinerja, tetapi juga sebagai alat pembelajaran organisasi (learning mechanism) untuk menyesuaikan strategi berdasarkan hasil evaluasi periodik. (Naser et al., 2023) menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban investasi yang disusun secara rutin membantu manajer dalam mengambil keputusan strategis. Sementara itu, (Siswanto, 2024) menunjukkan bahwa audit eksternal dapat memperkuat kredibilitas laporan tersebut.

Kombinasi keduanya menciptakan siklus pengendalian manajemen yang ideal: manajer bertanggung jawab atas hasil investasi, laporan disusun untuk menilai kinerja, audit memastikan keandalan laporan, dan hasilnya digunakan kembali untuk perencanaan investasi berikutnya. Sistem ini menunjukkan bagaimana prinsip pertanggungjawaban dapat menghubungkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan secara berkelanjutan (continuous improvement).

Lebih jauh, penelitian ini menegaskan bahwa akuntansi pertanggungjawaban pusat investasi memiliki nilai strategis lintas sektor. Pada sektor swasta, sistem ini menjadi fondasi untuk meningkatkan efisiensi modal dan daya saing; pada sektor publik, ia berfungsi menjaga integritas dan akuntabilitas lembaga negara dalam mengelola dana publik. Kedua sektor pada akhirnya membutuhkan sistem yang mampu menyeimbangkan antara efisiensi ekonomi dan tanggung jawab sosial.

Dengan demikian, hasil dan pembahasan ini memperkuat hipotesis bahwa terdapat kesamaan prinsip penerapan pusat pertanggungjawaban investasi antara lembaga publik dan swasta, meskipun orientasi pelaksanaannya berbeda. Sistem akuntansi pertanggungjawaban terbukti menjadi instrumen yang adaptif, universal, dan berperan penting dalam memastikan bahwa setiap penggunaan dana investasi dapat dipertanggungjawabkan secara efisien, transparan, dan berkelanjutan.

CONCLUSION

Hasil sintesis terhadap enam penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sistem akuntansi pertanggungjawaban, khususnya dalam bentuk pusat investasi, berperan penting dalam memperkuat efektivitas pengendalian manajemen dan akuntabilitas keuangan organisasi. Prinsip utama dari sistem ini adalah pembagian tanggung jawab keuangan kepada manajer unit yang dapat diukur melalui indikator kinerja keuangan yang objektif, sehingga hasil kerja setiap unit dapat dievaluasi secara adil dan transparan.

Dalam konteks sektor swasta, seperti yang ditunjukkan oleh (Naser et al., 2023) pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk serta oleh (Moha et al., 2014) pada PT Ake Abadi Airmadidi, akuntansi pertanggungjawaban telah berhasil menciptakan disiplin keuangan, meningkatkan efisiensi modal, dan memperkuat koordinasi antarunit organisasi. Penggunaan rasio-rasio seperti Return on Assets (ROA), Return on Investment (ROI), dan Gross Profit Margin (GPM) menjadi alat penting dalam mengevaluasi sejauh mana sumber daya digunakan secara produktif.

Sementara itu, penelitian (Anjani et al., 2022) memperlihatkan bahwa penerapan sistem ini dalam konteks perbankan syariah menambahkan dimensi moral dan etika bisnis. Di sini, sistem pertanggungjawaban tidak hanya berorientasi pada laba, tetapi juga pada kesesuaian terhadap nilai-nilai syariah seperti keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Pendekatan ini memperkaya konsep akuntansi pertanggungjawaban karena menegaskan

bahwa tanggung jawab keuangan tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab sosial dan spiritual.

Pada sisi sektor publik, seperti yang ditemukan oleh (Oki & Krisnawan, 2022) okpk dalam studi tentang Pusat Investasi Pemerintah (PIP), sistem pertanggungjawaban investasi berperan sebagai instrumen utama dalam memastikan transparansi penggunaan dana publik. Krisnawan menegaskan bahwa tata kelola keuangan yang baik dan pelaporan yang terukur memungkinkan lembaga publik mempertahankan kepercayaan masyarakat sekaligus menjamin efisiensi penyaluran dana ke sektor produktif.

Penelitian (Siswantoro, 2024) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa mekanisme audit eksternal merupakan elemen vital dalam menjaga kredibilitas sistem pertanggungjawaban investasi. Hubungan positif antara Return on Equity (ROE) dan Non Performing Loan (NPL) yang dimoderasi oleh audit eksternal menunjukkan bahwa pengawasan independen berkontribusi besar dalam mengontrol risiko keuangan lembaga publik. Audit eksternal tidak hanya menjadi alat pemeriksaan, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan antara manajemen internal dan akuntabilitas eksternal terhadap publik dan pemerintah.

Kemudian, (Elya Dasuki, 2025) menegaskan pentingnya aspek pengelolaan risiko keuangan dan pembentukan SOP (Standard Operating Procedure) pada koperasi penerima dana investasi pemerintah. Penerapan SOP risiko keuangan meningkatkan kapasitas koperasi dalam mengelola dana publik secara akuntabel, serta memperkuat pengawasan internal agar risiko gagal bayar dapat ditekan seminimal mungkin. Melalui proses pendampingan dan edukasi manajerial, konsep pusat pertanggungjawaban investasi terbukti dapat diterapkan bahkan di organisasi skala mikro, asalkan terdapat sistem pelaporan yang jelas dan disiplin administratif yang kuat.

Dari seluruh hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban pusat investasi memiliki prinsip yang bersifat universal, tetapi penerapannya bersifat kontekstual. Dalam organisasi swasta, sistem ini diarahkan untuk mengoptimalkan efisiensi modal dan profitabilitas; sedangkan dalam lembaga publik, orientasinya lebih pada penguatan transparansi, tata kelola, dan keberlanjutan sosial. Meskipun terdapat perbedaan orientasi, keduanya sama-sama menunjukkan bahwa penerapan sistem pertanggungjawaban investasi meningkatkan kinerja organisasi dan memperkuat kredibilitas lembaga di mata pemangku kepentingan.

Kesimpulan umum dari penelitian ini adalah bahwa pusat pertanggungjawaban investasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian manajerial, tetapi juga sebagai mekanisme strategis untuk memastikan keselarasan antara tujuan organisasi dan hasil yang dicapai. Penerapan sistem ini terbukti efektif dalam menekan inefisiensi, mempercepat evaluasi, serta menciptakan keterbukaan dalam pelaporan keuangan. Selain itu, sistem ini juga berperan sebagai alat komunikasi manajerial antara pimpinan dan bawahan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan investasi.

Implikasi Teoritis

Secara teoritis, hasil kajian ini memperkuat konsep responsibility accounting yang dikemukakan oleh Anthony & Govindarajan, bahwa efektivitas organisasi bergantung pada sejauh mana tanggung jawab didelegasikan secara jelas kepada individu atau unit kerja yang kinerjanya dapat diukur. Penelitian ini memperluas pemahaman tersebut dengan menunjukkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban juga dapat berperan sebagai alat tata

kelola publik (public governance mechanism), terutama dalam konteks lembaga keuangan pemerintah seperti PIP dan mitranya. Dengan demikian, teori akuntansi pertanggungjawaban tidak lagi terbatas pada perusahaan profit-oriented, tetapi juga relevan bagi lembaga yang berorientasi pada pelayanan publik dan kesejahteraan sosial.

Kajian ini juga memperkuat teori pengendalian manajemen (management control theory) yang menekankan pentingnya integrasi antara pengukuran kinerja finansial dan non-finansial. Seperti yang terlihat pada studi (Anjani et al., 2022), penerapan indikator Economic Value Added (EVA) dalam sistem pertanggungjawaban syariah menunjukkan bahwa organisasi modern harus menggabungkan dimensi moral, sosial, dan ekonomi dalam satu sistem pengendalian terpadu. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan model teoritis yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam bidang akuntansi manajemen.

Implikasi Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan pedoman bagi organisasi publik maupun swasta dalam merancang sistem pengendalian keuangan yang lebih efektif. Pertama, organisasi perlu menyesuaikan indikator kinerja pusat investasi dengan tujuan strategisnya. Sektor perbankan dan industri dapat mengandalkan rasio ROI dan ROA untuk mengukur efisiensi modal, sementara lembaga publik dapat menambahkan indikator audit eksternal dan efisiensi dana publik untuk menilai keberhasilan program investasi.

Kedua, pelaporan keuangan harus dilakukan secara rutin dan disertai mekanisme audit yang jelas agar hasil investasi dapat dievaluasi secara objektif. Ketiga, lembaga pemerintah yang menyalurkan dana publik kepada mitra pelaksana, seperti koperasi atau lembaga pembiayaan mikro, perlu memperkuat kapasitas manajerial melalui pelatihan dan penerapan SOP risiko keuangan. Langkah ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas lembaga pelaksana, tetapi juga menekan risiko gagal bayar serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap program pemerintah.

Selain itu, hasil kajian ini menunjukkan bahwa sinergi antara pengukuran kinerja keuangan (ROI, ROA) dan pengawasan eksternal (audit dan SOP) merupakan kombinasi paling efektif dalam menjaga keberlanjutan investasi. Kombinasi tersebut menciptakan sistem pertanggungjawaban yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga kokoh secara etika dan sosial.

RECOMMENDATIONS

Meskipun hasil penelitian ini memberikan gambaran yang cukup komprehensif, masih terdapat ruang bagi pengembangan penelitian lebih lanjut. Penelitian berikutnya dapat dilakukan dengan pendekatan empiris kuantitatif yang melibatkan lebih banyak objek penelitian dari berbagai sektor, untuk menguji secara statistik hubungan antara sistem akuntansi pertanggungjawaban dan kinerja investasi organisasi. Selain itu, studi longitudinal yang menelusuri penerapan sistem ini dalam jangka waktu tertentu akan sangat berguna untuk menilai dampak jangka panjang dari penerapan pusat pertanggungjawaban terhadap efektivitas manajerial.

Penelitian masa depan juga dapat mengeksplorasi integrasi antara akuntansi pertanggungjawaban dan teknologi informasi, terutama bagaimana sistem pelaporan digital dapat mempercepat evaluasi kinerja dan meningkatkan transparansi. Dalam konteks publik,

penelitian dapat diarahkan untuk menilai efektivitas sistem pertanggungjawaban dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana pemerintah. Sedangkan di sektor swasta, fokus dapat diarahkan pada bagaimana pusat pertanggungjawaban berkontribusi terhadap penciptaan nilai bagi pemegang saham dalam era persaingan global.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pusat pertanggungjawaban investasi merupakan elemen vital dalam sistem pengendalian manajemen modern. Baik di sektor publik maupun swasta, sistem ini menjadi sarana yang menjembatani antara strategi, pelaksanaan, dan hasil akhir organisasi. Dengan penerapan yang tepat, sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan profitabilitas, tetapi juga memperkuat tata kelola dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, pengembangan dan penyempurnaan sistem akuntansi pertanggungjawaban investasi perlu terus dilakukan agar organisasi di Indonesia mampu bersaing dan tumbuh secara berkelanjutan di tengah perubahan ekonomi global yang dinamis.

REFERENCES

- Anjani, U., Zahroh, A. F., Fransisca, D., & Santoso, S. B. (2022). Analisis Pengukuran Kinerja Investasi Dan Akuntansi Pertanggungjawaban Pada Bank Syariah. *Jurnal EMBA*, 10(1), 237-244.
- Elya Dasuki, R. (2025). Adaptasi Koperasi Dalam Pengelolaan Risiko Keuangan: Praktik Penyusunan Standard Operational Procedure (SOP) Risiko Penyaluran Kredit Bagi Koperasi Penerima Dana Usaha Mikro dari Pusat Investasi Pemerintah-Kementrian Keuangan. *E-Coops-Day*, 6(1), 85-96. <https://doi.org/10.32670/ecoopsday.v6i1.5176>
- Kambono, H. (2020). Pengaruh Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Elyzabet Indrawati Marpaung. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 137-145. <http://journal.maranatha.edu>
- Kiki Hardiansyah Siregar, N. R. (2019). Analisa Penerapan Pusat Pertanggungjawaban Laba Pada Pt. Pegadaian (Persero) Kanwil I. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699.
- Moha, A. P., Murni, S., & Sepang, J. L. (2014). KINERJA KEUANGAN DITINJAU DARI PUSAT BIAYA, PENDAPATAN, LABA DAN PUSAT. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(3), 1564-1574.
- Naser, F. U. M., Karamoy, H., & Mawikere, L. M. (2023). Evaluasi Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Salah Satu Dasar Penilaian Prestasi Manajemen Pusat Investasi Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Evaluation of Accountability Accounting as One of the Basis for Assessment of. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(2), 1605-1614.
- Oki, O., & Krisnawan, B. (2022). Analisis strategi Pusat Investasi Pemerintah dalam menghadapi holding ultra mikro dengan pendekatan porter's five forces. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 7(1), 21-31. <https://doi.org/10.33105/itrev.v7i1.475>
- Siswantoro, G. W. (2024). DETERMINAN NON PERFORMING LOAN DENGAN AUDIT EKSTERNAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK MITRA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH INDONESIA.
- Waney, Q. E. (2022). Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Pusat Investasi Untuk Menilai Kinerja Manajemen Pada PT . Bank SULUTGO Implementation of Responsibility Accounting as The Investment Center to Assess Management Performance in PT . Bank SULUTGO. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 5(2), 729-736.